

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan

IPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Radar Sampit Halaman : 02

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabungan

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Opini WTP, Bukti Kinerja Pemprov Dapat Dipertanggungjawabkan



RAPUR: Sekda Kalteng H Nuryakin saat menghadiri Rapur ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (3/6).

**PALANGKA RAYA**-Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa, karena sudah yang ke-10 kalinya berturut-turut sejak tahun 2014.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin mengatakan, raihan ipini WTP dari BPK RI membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Alhamdulillah, LKPD TA 2023 meraih opini WTP dari BPK RI, capaian ini menjadi keberhasilan ke-10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan 2023," ujarnya pada rapat paripurna (Rapur) ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (3/6).

Nuryakin menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama yang

erat antara Pemprov Kalteng DPRD Kalteng sebagai mitra kerja. Ia menjelaskan, pelaksanaan APBD TA 2023 telah diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi, serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Fokus utamanya termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, ekonomi hijau, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," sebutnya.

Secara ringkas, pertanggungjawaban APBD mencatat pendapatan sebesar Rp6,6 triliun lebih, dengan realisasi mencapai 101,96 persen dari target hingga 31 Desember 2023. Sementara itu, belanja sebesar Rp7,309 triliun lebih, dengan realisasi mencapai 86,54 persen dari target pada periode yang sama.

"Neraca Pemprov Kalteng per 31 Desember 2023 menunjukkan total aset sebesar Rp15 triliun lebih, total kewajiban Pemprov Kalteng sebesar Rp313,212 miliar lebih dan total ekuitas Rp14,687 triliun lebih," ungkapnya. (zia/abw)